

REKONSTRUKSI PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK¹

Oleh : Jendrius²

Abstract

This article discuss about role of women in politic in Indonesia and possibilities to reconstruction that role. General believe that women has central roie in history of national struggle, but that role had ellimaneted by the studies that conducted by social reserachers had tend male bias. The reconstruction process will be barried by objective conditions of women in Indonesia that they complex and heterogenous in economic, educational and social class, ethnic, etc. The character asassination by orde baru regime had negative impacts to women and women organization. Then patriarch culture, gender ideology and values push women to restrict by herself to participate in political field

Pendahuluan

Berbicara mengenai peran perempuan dalam politik merupakan masalah yang cukup rumit dan komprehensif yang tidak cukup diperbincangkan dalam satu dua jam. Tidak memadai jika hanya dipandang dari satu perspektif dan pendekatan saja. Disadari maupun tidak isu mengenai peran perempuan merupakan realitas yang berdimensi banyak dan kompleks, konon lagi jika kita bicara mengenai rekonstruksi peran perempuan dalam politik. Menurut hemat saya ada

¹ Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar Sehari "Merekonstruksi Peranan Perempuan Dalam Kancah Politik Bangsa Sebagai Negara Demokrasi" HMI Komisariat Sastra dan Ilmu Budaya Islam (Adab), IAIN Imam Bonjol Padang, 8 Mei 2004

² Staf Pengajar pada Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

banyak pertanyaan dan permasalahan yang timbul dan harus dijawab terlebih dahulu sebelum kita bicara lebih lanjut. Pertanyaan yang paling sederhana tapi sangat mendasar tentunya adalah : ada apa dengan peran perempuan dalam politik selama ini sehingga peran tersebut perlu dikonstruksi ulang (rekonstruksi)?

Bagaimana seharusnya peran ideal perempuan dalam politik? Apakah keterlibatan perempuan dalam politik merupakan suatu keharusan? Apa makna dan signifikansi peran dan keterlibatan perempuan dalam politik baik untuk masyarakat dan negara terlebih lagi bagi perempuan itu sendiri? Prasyarat dan kondisi seperti apa yang diperlukan untuk dapat melakukan rekonstruksi peran tersebut? dan seterusnya.

Dari kenyataan di atas ada banyak hal yang harus didiskusikan dan disepakati dulu untuk sampai pada sebuah pemahaman mengenai pentingnya rekonstruksi peran perempuan dalam politik. Tentu pula harus dituntaskan dulu berbagai pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan rekonstruksi peran perempuan tersebut, dan untuk itu jelas memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit. Karena itu tulisan sederhana ini tidak berpretensi

sama sekali untuk menawarkan sebuah solusi yang komprehensif tentang rekonstruksi peran perempuan dalam politik melainkan sekedar memaparkan kondisi obyektif mengenai peran perempuan dalam politik.

Menurut hemat saya ketika berbicara mengenai peran perempuan dalam politik mau tidak mau akan sukar bagi kita memahami kondisi tersebut sebagai sebuah realitas yang terpisah dari hingar-bingar, pasang naik dan pasang surut, bahkan wajah coreng-moreng dalam kehidupan dan proses politik dinegara kita. Adalah hal yang mustahil juga berusaha untuk memahami peran politik perempuan jika tidak dihubungkan dengan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Artinya kondisi kekinian yang menggambarkan dan merepresentasikan bagaimana peran perempuan dalam panggung politik merupakan produk sejarah dan hasil tali-temali yang saling berkelindan dari nilai, norma, kesadaran, ideologi, peran yang dimainkan negara, dan berbagai anasir lainnya.

SEJARAH PERAN POLITIK PEREMPUAN DAN MALE BIAS

Bila kita mencoba mengkritisi sejarah peran perempuan di Indonesia, dengan jelas

akan terlihat bahwa ternyata sejarah dan juga ilmu sosial lainnya seperti Sosiologi dan Antropologi kurang bersahabat dan tidak memihak perempuan. Perempuan dalam penggambaran sejarah perjuangan bangsa misalnya hampir tidak pernah dilihat sebagai aktor sejarah yang independen yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjuangan bangsa. Martha Christina Tiahahu berjuang membantu ayahnya Kapten Paulus Tiahahu. Nyi Ageng Serang bersama Cucunya R.M Papak memimpin pasukan menggunakan "Panji Gula Kelapa". Cut Nyak Dien Berjuang dengan suaminya Teuku Umar, begitu juga dengan Ciut Meutia berjuang bersama suaminya Teuku Muhammad yang dikenal dengan nama Cik Tunong.³ Artinya, sama dengan peran ekonomi perempuan dalam rumah tangga dimana perempuan umumnya dianggap hanya sebagai pencari nafkah tambahan dalam sejarah perjuangan kemerdekaanpun peran perempuan dipahami tidak lebih sebagai peran yang komplementer saja.

Kajian Sosio-Antropologis mengenai masyarakat dan budaya Minangkabau misalnya

³ Kongres Wanita Indonesia: *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. PN. Balai Pustaka, 1978.

juga sangat *male bias*. Walaupun dipahami bahwa perempuan dianggap menduduki peran sentral, namun pembahasan dan analisis lebih banyak dilakukan untuk menyigi peran laki-laki, baik sebagai mamak, saudara laki-laki maupun suami. Perubahan atau pergeseran peran laki-laki ini yang kemudian dipahami dan dianggap berpengaruh terhadap perubahan struktur dan fungsi keluarga dan masyarakat Minangkabau. Sementara itu peran perempuan entah itu sebagai istri, saudara perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan ibu (*etek*), hampir-hampir tidak pernah disinggung sama sekali.⁴

Peran perempuan di Minangkabau sering digambarkan sebagai "*limpapeh rumah nan gadang, umbun puro pagangan kunci*" yang bermakna sebagai pemegang peran yang sangat sentral dalam rumah gadang dan keluarga luasnya. Logikanya jika perempuan memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam keluarga dan kerabatnya, tentu juga sekaligus memiliki peran besar dalam komunitas dan

⁴ Tulisan yang sangat baik yang menggambarkan peran sentral perempuan di Minangkabau lihat Joke van Reenen. *Central Pillar of The House*. Research School CBWS, Leiden, 1996.

masyarakat yang lebih luas. Namun kenyataannya tidak demikian, urusan politik (proses pengambilan keputusan) di tingkat yang lebih luas seperti nagari merupakan urusan dan bagian laki-laki sementara perempuan tidak mendapat tempat sama sekali. Paling-paling suara perempuan sebagai "urang dapa" ikut didengar sebelum mamak berunding di balai adat. Kalaupun melibatkan perempuan lagi-lagi sekedar "*pangganok-an nan ganjia, pancukuik-an nan kurang*". Agar tetap dianggap sebagai masyarakat yang demokratis maka dalam Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) harus ada unsur perempuan (Bundo Kandung) yang sebenarnya tidak memiliki makna yang signifikan ditengah dominasi laki-laki. Kemudian semua kita, bahkan tak terkecuali perempuan sendiri menerima kenyataan itu dengan segala senang hati bahkan sangat membanggakan-nya.

Tapi benarkah sesungguhnya peran perempuan di Minangkabau hanya berputar sekitar rumah tangga dan kekerabatan saja? Temuan Reenen misalnya dengan lugas menyatakan bahwa dengan perannya sebagai saudara perempuan, istri dan ibu, seorang perempuan memiliki akses dan peluang yang besar untuk

mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat antar kaum bahkan di nagari. Dalam sebuah penelitian saya pernah menemukan kenyataan bahwa seorang perempuan mampu mengorganisir dan mempengaruhi proses pembangunan madrasah di kampungnya lewat pengaruhnya yang besar terhadap anak dan saudara laki-lakinya, sementara yang bersangkutan bermukim di Jakarta dan dalam waktu yang cukup lama tidak pernah pulang ke kampungnya. Dalam musim kampanye beberapa waktu yang lalu di sebuah nagari di Pasaman Barat saya juga melihat bahwa beberapa partai politik memerlukan "*sowan*" kepada seorang perempuan mantan guru karena dianggap berpengaruh terhadap pilihan masyarakat (yang tentu saja termasuk laki-laki).

Saya yakin diantara kita di dalam ruangan ini mungkin banyak yang belum pernah mendengar informasi bahkan mungkin kurang yakin bahwa di Minangkabau pernah sebuah Kerapatan Adat nagari (KAN) mengangkat seorang perempuan sebagai *Mamak Kapalo Waris* yang dianggap merupakan *privilege* yang hanya diberikan kepada laki-laki. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 November 1934 di Nagari Simanau, Onderdistrik Soepanjang, District

Alahan Panjang, Apdeeleng Solok. Untuk lebih jelasnya sengaja saya kutip di sini:

"...sekatolah kami kerapatan negari nan terseboet panghoeloe-panghoeloe dan orang 4 djinis serta orang toea tjardik pandai menjadikan sekarang seorang perempuan jang tertoea lagi tjardik pandai nama Si Djami soekoe Malajoe negari Simanau jang menjadi kepala waris jang akan memegang segala harta poesaka Radjo Panghoeloe, hutan tanah sawah sama sekali..."⁵

Menurut Korn ternyata perempuan tidak hanya berperan sebagai *Mamak Kapalo Waris* bahkan juga bertindak sebagai penghulu. Berikut cuplikannya:

"...Kekuasaan wanita juga terasa dalam pelaksanaan kekuasaan. Pada pelantikan *pangulu*, tidak hanya

kaum wanita menduduki tempat kehormatan dan *pangulu* yang baru itu minta izin kepada ibunya sebelum memakai *deta*, tetapi wanita sendiri dapat juga bertindak sebagai *pangulu*. Demikianlah saya dapati di nagari Pianggu onderafdeleng Solok, seorang perempuan yang menjadi *pangulu suku adat suku* Supanjang, tetapi segera orang dapat menyebutkan kepada saya beberapa contoh lain di wilayah-wilayah pemerintahan lainnya. Dua keturunan yang lalu, Salayo bahkan dipegang oleh seorang *TuanKu Lareh* yang perempuan..."⁶

PERAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam konteks bernegara, peran perempuan dalam politik di Indonesia telah dimulai sejak awal Abad XX yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai organisasi perempuan yang mengusung beberapa isu penting yang menyangkut kepentingan perempuan. Organisasi perempuan

⁵ Tulisan ini bersumber dari V.E Korn. "De Positie der Vrouw in eigen huis en als Pasoemandan" dalam TBG 1941 hal. 318-324. yang kemudian diterjemahkan dan dimuat dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. UGM Press, Yogyakarta, 1983, hal. 22.

⁶ *Ibid*

tersebut diantaranya: Putri Mahardika (Jakarta) Kewanitaan Sarekat Islam (Garut) Wanito Utomo (Yogyakarta), Sopo Tresno/Aisyah (Yogyakarta), Amai Setia (Koto Gadang), Serikat Kaoem Iboe Sumatra (Bukittingi). Tema umum yang sangat mendapat perhatian waktu itu adalah masalah pendidikan bagi perempuan serta masalah seputar perkawinan, perlawanan terhadap adat istiadat serta kekuasaan kolonial. Perempuan juga mulai aktif dalam organisasi keagamaan dan partai politik yang sebelumnya di dominasi laki-laki juga menyuarakan hak mereka melalui media massa kusus perempuan seperti Soenting Melayu (Koto Gadang) dan Soeara Perempuan (Padang).

Tahap berikutnya sampai masa awal kemerdekaan merupakan fase yang penting dalam perjuangan dan sejarah perempuan dalam politik. Paling tidak peristiwa penting yang dapat dicatat adalah terselenggaranya kongress wanita yang diikuti oleh sejumlah organisasi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang jauh lebih penting lagi kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang cukup strategis bagi perempuan seperti misalnya masalah perdagangan perempuan dan pengiriman mosi terhadap majelis agama agar

menafsirkan ajaran agama terutama mengenai perkawinan secara lebih fair dan benar. Dalam fase ini juga semakin terlihat pengaruh besar dari atmosfer perjuangan nasional ikut mempengaruhi peran perempuan.

Fase dan tahapan berikutnya organisasi dan pergerakan perempuan jatuh bangun sesuai dengan dinamika perkembangan atmosfer politik di tanah air. Tapi paling tidak sebelum kemunculan Orde Baru berbagai bentuk dan afiliasi organisasi perempuan tumbuh subur dan berkembang, baik yang berafiliasi keagamaan maupun partai politik; yang dari sekedar mengurus masalah kebutuhan praktis jender sampai kepada organisasi perempuan yang progresif yang secara langsung mempertanyakan persoalan ketidakadilan dan ketimpangan jender.⁷

⁷ Bahan referensi yang sangat baik, lengkap dan kritis mengenai sejarah gerakan perempuan di Indonesia lihat dua karya tulis Saskia Eleonora Wieringa, yakni *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Garba Budaya dan Kalyanamitra, Jakarta, 1999 dan *Kuntulanak Wangi*, Kalyanamitra, Jakarta, 1998. Lihat juga *Kongres Wanita Indonesia: Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 1978.

Yang lebih menarik adalah memahami kondisi dan perkembangan peran politik perempuan dalam masa pemerintahan Orde Baru dimana terjadi proses kooptasi terhadap organisasi dan peran politik perempuan yang dampaknya masih sangat terasa sampai saat ini. Pada awal pemerintahan Orde Baru berbagai organisasi perempuan "dibersihkan" dari anasir kiri bahkan juga "ekstrim kanan". Beberapa partai politik dibubarkan dan tidak dibiarkan hidup (tentu saja termasuk organisasi perempuannya) karena dianggap berafiliasi dengan dua anasir di atas. Organisasi perempuan yang dibiarkan hidup pun ruang gerakannya dibatasi bahkan diharuskan bergabung dengan partai politik tertentu.

Pada masa ini pula pemerintah menciptakan organisasi perempuan Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi dan satulagi organisasi yang dibiarkan hidup bahkan diorganisir oleh pemerintah yakni PKK. Ketiga organisasi ini tidak saja berfungsi melanggengkan peran tradisional jender perempuan sebagai istri pendamping setia suami, ibu pendidik dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumah tangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga dan sebagai anggota masyarakat yang berguna, yang kesemuanya

tentu dengan cara-cara yang pantas dan sesuai dengan "kodrat perempuan"; tapi sekaligus juga berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap perempuan. Masalah politik dan negara cukup menjadi konsumsi bapak-bapak sementara perempuan mengurus anak dan suami dan karena secara tradisional perempuan Indonesia terbiasa sibuk maka diberikan kegiatan untuk merangkai bunga, lomba kebaya, demonstrasi memasak, sembari mengukuhkan posisi subordinasinya dalam politik.

KONDISI OBYEKTIF PEREMPUAN DAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Terlepas dari semua persoalan di atas perlu disadari kondisi obyektif perempuan Indonesia maupun gerakan perempuan itu sendiri. Saya mencatat ada beberapa kondisi dan hal penting yang ikut berpengaruh terhadap gerakan perempuan sekaligus peran politik perempuan:

1. Salah satu ciri utama pergerakan perempuan di Indonesia dari awal sampai saat sekarang adalah, pergerakan dan organisasi tersebut digagas oleh perempuan kelas menengah dan atas yang terdidik dan mapan. Hal ini jelas berdampak

terhadap adanya gap sosial antara mereka dengan kelompok yang mereka perjuangkan dan hal tersebut berpengaruh terhadap aktivitas dan partisipasi yang rendah dari masyarakat kelas bawah.

2. Perempuan Indonesia bukan merupakan suatu kelompok yang homogen melainkan suatu kelompok yang sangat bervariasi tidak hanya dalam latar belakang tingkat pendidikan, melainkan juga berasal dari kelompok etnis, kelas sosial, agama dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi kedua kelompok perempuan tersebut. Nilai sosial yang berbeda misalnya berpotensi sekali menjadikan perempuan sebagai penindas bagi perempuan yang lain. *Women womeni lupus*, atau dengan meminjam istilah Wieringa mereka adalah *Kuntilanak wangi*.

3. Dalam perkembangan sejarah gerakan perempuan tampak peran negara sangat dominan ikut menyeret bahkan mengkooptasi gerakan perempuan. Dalam era Sukarno misalnya bagaimana isu poligini misalnya menjadi sumber perpecahan diantara organisasi perempuan, begitu juga pemanfaatan organisasi perempuan untuk tujuan politik. Semen-

tara itu pada era Suharto organisasi perempuan diberangus dan yang dibiarkan hidup adalah organisasi perempuan yang bisa dijinakkan atau sengaja dibentuk untuk kepentingan penguasa.

4. Masih kuat dan mengakarnya budaya patriarki dan ideologi jender serta berbagai nilai yang sejalan dan mendukung budaya patriarki tersebut misalnya *maternal deprivation* (deprivasi kasih sayang ibu) termasuk dalam diri perempuan sendiri yang menjadikan perempuan membatasi diri untuk terlibat dalam kegiatan politik. Paling tidak kenyataan ini terlihat jelas dari proses pemilu kemaren. Peluang quota 30 persen bagi perempuan seperti yang diamanatkan oleh pasal 65 UU Pemilu sebagai bentuk *affirmative action* untuk lebih mendorong perempuan terlibat dalam pentas politik ternyata tidak diapresiasi secara memadai kalau tidak bisa dibilang tidak mendapat respons sama sekali.

REKONSTRUKSI PERAN POLITIK PEREMPUAN :

Antara Tuntutan dan Kenaifan

Dengan bercermin terhadap proses panjang sejarah pergerakan perempuan dan

kondisi obyektif perempuan dan gerakan perempuan itu sendiri rasanya terlalu naif untuk berbicara mengenai rekonstruksi peran politik perempuan. Saya melihat dampak "pembunuhan karakter" yang dilakukan pemerintah orde baru memang sangat luar biasa dan memberikan *sock therapy* yang hebat terhadap berbagai organisasi perempuan yang pernah tumbuh dan berkembang sebelumnya. Sehingga untuk "memaksa" perempuan masuk ke parlemen sebagai salah satu bentuk usaha untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan masih merupakan jalan panjang dan berliku.

Walaupun demikian saya melihat peluang tersebut ada

pada kelompok-kelompok strategis seperti NGO dan kelompok profesi. Saya juga melihat ada *ghirah* dan kebangkitan kembali gerakan perempuan di Indonesia yang dimotori juga oleh perempuan kelas menengah yang giat menerbitkan berbagai media informasi, menerjemahkan dan mendisseminasi berbagai karya dan penelitian tentang perempuan, melakukan berbagai pelatihan dan advokasi dan sebagainya. Tapi sejauh mana berbagai usaha tersebut akan mangkus membawa perubahan pada peran perempuan dalam politik, hanya waktu dan keadaan yang akan mampu menjawab.

Daftar Bacaan

- Joke van Reenen. *Central Pillar of The House*. Research School CBWS, Leiden, 1996
- Kongres Wanita Indonesia: *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. PN. Balai Pustaka, 1978
- V.E Korn. "De Positie der Vrouw in eigen huis en als Pasoemandan" dalam **TBG** 1941, yang kemudian diterjemahkan dan dimuat dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. UGM Press, Yogyakarta, 1983